

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Toto Sugiarto

Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Abstract

This research is aim to identify and also evaluate document about planning and budgeting of educational in regancy South of Solok and also formulate policy, program, activity of relevant educational so that can finish problems of education in regancy South of Solok. Data is used in this research is primary data and data of sekunder. Method analysis that is: method analyze classification of problem of educational, Analyze SWOT, and Analysis Planning and Budgeting of Education in the regancy South of Solok. Result of planning document analysis (educational RPJPD, education RPJMD, RKPD, Renstra and Renja of duty Education) and analysis budgeting document (KUA and APBD) in middle and elementary educational in regancy South of Solok, not yet followed compilation order pursuant with Law number 25/ 2004, about Systems Planning of National Development.

Kata Kunci: Perencanaan dan Penganggaran, Dana Pendidikan, Solok Selatan

PENDAHULUAN

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah otonom baru yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Solok berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 2003. Sebagai daerah otonom baru daerah ini memiliki keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya dunia pendidikan di kabupaten ini. Menyadari pentingnya pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka proses perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan masyarakat Kabupaten Solok Selatan harus dilaksanakan dengan serius.

Pada penyelenggaraan kebijakan desentralisasi pendidikan, perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan pendidikan sangat dibutuhkan. Agar

perencanaan dan penganggaran bersifat realistik dan tepat sasaran maka perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah yang menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka rencana dan anggaran.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan membutuhkan adanya sebuah pedoman yang sinergis. Salah satu bentuk perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan tingkat daerah meliputi: a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, b) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun. c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun, d) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun, e) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.

Penganggaran merupakan komponen yang penting dalam proses perencanaan. Hal ini dikarenakan, sejalan dengan proses tahapan penyusunan dan penetapan perencanaan, terdapat juga proses tahapan yaitu penyusunan kebijakan, penyusunan program, penyusunan pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyempurnaan program.

Menurut *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-

rencana yang dibuat dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (Mardiasmo, 2002).

Performance budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan *unit cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Indra Bastian, 2006).

Dalam pelaksanaannya, pendidikan di Kabupaten Solok Selatan masih terkendala dengan beberapa permasalahan yakni: (1) permasalahan kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang tidak merata dan kurangnya ketersediaan aksesibilitas hingga ke daerah-daerah yang terisolir dan tertinggal, (2) kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan dan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan dan program pembangunan pendidikan, (3) ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran pendidikan. Perencana anggaran belum membiasakan penggunaan dokumen-dokumen kearsipan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RENSTRA Pendidikan (Rencana Strategis Pendidikan), dan RENJA Pendidikan (Rencana Kerja Pendidikan) dalam proses perencanaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi dokumen tentang perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kabupaten Solok Selatan, serta merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan bidang pendidikan yang relevan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kabupaten Solok Selatan, dan untuk melihat sejauh mana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kabupaten Solok Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Moh. Nazir (2003) mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan, yaitu melalui sejumlah wawancara langsung dan mendalam dengan responden sebanyak 20 orang, kemudian dilanjutkan

dengan teknik observasi (pengamatan) yang dilakukan dalam wilayah penelitian. Data sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka atau studi dokumentasi secara kualitatif yang bersumber dari dinas/instansi serta *stakeholder* terkait. Data yang dikumpulkan berupa dokumen perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Solok Selatan. Penentuan tempat penelitian dilakukan secara terstruktur sesuai tujuan (*purpose sampling*), yakni dinas pendidikan dan instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian.

Untuk menentukan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan agar tercapai standar pelayanan minimum digunakan Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT akan memperlihatkan kekuatan dan kelemahan dari faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan.

Analisis faktor eksternal dilakukan dengan cara memasukkan variabel ke dalam matriks tabel EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*), serta memberikan bobot dan rating pada setiap peluang dan ancaman yang ada, kemudian mengalikan bobot dan rating tersebut. Hasil penjumlahannya akan menggambarkan berapa besar peluang dan ancaman yang dihadapi oleh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan analisis faktor internal dilakukan dengan memasukkan variabel ke dalam matriks tabel IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*), serta memberikan bobot dan rating. Hasil penjumlahan bobot x rating akan menggambarkan berapa besarnya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan yang mempengaruhi perkembangannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis SWOT Pendidikan Dasar

Kekuatan (Strength) Pendidikan Dasar

(1) Kemampuan pembiayaan / alokasi anggaran pendidikan yang meningkat. Peningkatan anggaran pendidikan dasar setiap tahunnya melalui program dan kegiatan, yang didasarkan pada undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dana pendidikan selain gaji pendidik dan

biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD) diharapkan mampu meningkatkan pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Solok Selatan, (2) Kaya akan budaya dan muatan-muatan lokal. Telah dibahas pada bab empat yang menjelaskan terdapat beberapa situs budaya dan sejarah yang potensial dan belum dikembangkan bahkan belum dikenal orang banyak. Beberapa cagar wisata pun banyak yang bisa dikembangkan, sebagai lahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, (3) Implementasi sistim penganggaran berbasis kinerja. Implementasi penganggaran berbasis kinerja menjadi kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penyusunan anggaran.

Kelemahan (Weakness) Pendidikan Dasar

(1) Masih terbatasnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik (guru). Kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik sangat menentukan dalam peningkatan kualitas pendidikan solok selatan. Kompetensi yang tidak memadai mengakibatkan kebanyakan para guru bahkan tidak benar-benar mendalami bahan ajarnya. Kualifikasi seorang guru sangat mempengaruhi teknik ataupun model dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa, (2) Dukungan sarana dan prasarana rendah. Dari 125 Sekolah Dasar (SD) yang ada baik negeri maupun swasta, maka 60 buah SD (48 %)

berada dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang yang perlu perbaikan secepatnya karena tidak layak lagi untuk proses belajar dan mengajar, (3) Rendahnya Angka Partisipasi di daerah terisolir. Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Solok Selatan masih menunjukkan belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Terutama pada daerah yang terisolir, dengan segala keterbatasan sarana prasarana yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendidikan, (4) Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Dinas Pendidikan yang masih rendah. Akibatnya kinerja dinas pendidikan sendiri dinilai masih rendah, dari hasil wawancara mandalam dengan beberapa stakeholder pendidikan yang menyebutkan secara kualitas dan kuantitas masih rendah.

Peluang (Opportunity) Pendidikan Dasar

(1) Mulai tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dengan cara mendirikan lembaga lembaga pendidikan informal seperti tempat kursus yang menunjang prestasi belajar siswa sekolah dasar, (2) Adanya kepedulian wakil-wakil rakyat di DPRD dalam dunia pendidikan dasar, (3) Peningkatan dana dari pemerintah pusat untuk bidang pendidikan. Berdasarkan undang-undang 1945 dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD), (4) Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan pendidikan di daerah, (5) Pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ancaman (Threats) Pendidikan Dasar

(1) Kondisi sosial budaya masyarakat yang membuat tidak konsen pada pendidikan, (2) Kurangnya koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar pelaku dan pengambil kebijakan pendidikan, (3) Respon orang tua yang belum maksimal, (4) Orang tua sebagai pendorong utama kemajuan pendidikan anak masih belum mampu berperan secara optimal. Orang tua masih memandang bahwa pendidikan formal adalah tugas seorang guru, bukan lagi tanggung jawabnya. Sehingga mereka hanya bersedia dan mampu membimbing peserta didik bidang-bidang diluar sekolah, (5) Tidak berfungsinya dengan baik komite sekolah dan dewan pendidikan.

Hasil Analisis SWOT Pendidikan Menengah

Kekuatan (Strength) Pendidikan Menengah

(1) Kemampuan pembiayaan / alokasi anggaran pendidikan yang sangat memadai, (2) Kaya akan budaya dan muatan-muatan lokal, (3) Implementasi sistim penganggaran berbasis kinerja, (4) Dukungan yang kuat dari Pemerintah daerah.

Kelemahan (Weakness) Pendidikan Menengah

(1) Fasilitas di sekolah kejuruan sangat minim, (2) Rendahnya daya saing siswa, (3) Kurangnya pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan, (4) Masih terbatasnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik.

Peluang (Opportunity) Pendidikan Menengah

(1) Adanya kepedulian wakil-wakil rakyat di DPRD dalam dunia pendidikan menengah, (2) Kebijakan pendidikan berbasis ICT melalui jardiknas, (3) Adanya potensi

daerah yang menjanjikan, (4) Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan di daerah.

Ancaman (Threats) Pendidikan Menengah

(1) Adanya animo masyarakat bahwa pendidikan tidak begitu penting, (2) Kurangnya koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar pelaku dan pengambil kebijakan pendidikan, (3) Respon orangtua yang belum maksimal terhadap pendidikan, (4) Perkembangan teknologi/informasi.

Tabel 1. IFAS dan EFAS Pendidikan Dasar

| No. | Faktor-faktor Strategis | Bobot (B) | Rating (R) | B x R | Kode |
|------------|---|-------------|------------|-------------|------|
| I. | Internal | | | | |
| A. | Kekuatan (Strengths) | | | | |
| 1. | Kemampuan pembiayaan/alokasi anggaran pendidikan yang meningkat | 0,20 | 4 | 0,80 | S1 |
| 2. | Kaya akan budaya dan muatan-muatan lokal | 0,15 | 3 | 0,45 | S2 |
| 3. | Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja | 0,15 | 4 | 0,80 | S3 |
| | Jumlah | 0,50 | | 2,05 | |
| B. | Kelemahan (Weakness) | | | | |
| 1. | Masih terbatasnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik | 0,15 | 1 | 0,15 | W1 |
| 2. | Dukungan sarana dan prasarana rendah | 0,10 | 2 | 0,20 | W2 |
| 3. | Rendahnya Angka Partisipasi pada daerah terisolir | 0,15 | 2 | 0,30 | W3 |
| 4. | Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Dinas Pendidikan yang masih rendah | 0,10 | 2 | 0,20 | W4 |
| | Jumlah | 0,50 | | 0,85 | |
| | Total IFAS | 1,00 | | 2,90 | |
| II. | Eksternal | | | | |
| A. | Peluang (Opportunities) | | | | |
| 1. | Mulai tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat | 0,20 | 4 | 0,80 | O1 |
| 2. | Adanya kepedulian wakil-wakil rakyat di DPRD dalam dunia pendidikan dasar. | 0,20 | 4 | 0,80 | O2 |
| 3. | Peningkatan dana dari pemerintah pusat untuk bidang pendidikan | 0,15 | 3 | 0,45 | O3 |
| 4. | Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan. | 0,15 | 3 | 0,45 | O4 |
| 5. | Kondisi sosial ekonomi masyarakat. | 0,20 | 3 | 0,80 | O5 |
| | Jumlah | 0,90 | | 3,30 | |
| B. | Ancaman (Threats) | | | | |
| 1. | Kondisi Sosial budaya masyarakat. | 0,03 | 2 | 0,06 | T1 |
| 2. | Kurangnya koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar pelaku dan pengambil kebijakan pendidikan | 0,02 | 1 | 0,02 | T2 |
| 3. | Respon orang tua yang belum maksimal terhadap pendidikan. | 0,02 | 1 | 0,02 | T3 |
| 4. | Tidak berfungsinya dengan baik komite sekolah dan dewan pendidikan | 0,03 | 2 | 0,06 | T4 |
| | Jumlah | 0,10 | | 0,16 | |
| | Total EFAS | 1,00 | | 3,46 | |

Sumber: Hasil perhitungan peneliti

Untuk pendidikan dasar, pemberian skor tabel IFAS dengan menetapkan skor bobot kekuatan tertinggi 0,20. Skor tersebut dimaksudkan karena peneliti memandang bahwa pendidikan dasar di solok selatan memiliki alokasi anggaran yang sangat memadai. Sedangkan skor bobot kekuatan terendah adalah 0,15 untuk point kaya akan budaya dan muatan-muatan lokal dan implementasi sistim penganggaran berbasis kinerja yang juga menentukan dalam pembangunan pendidikan dasar di solok selatan.

Pemberian skor pada tabel EFAS, peneliti memberikan skor tertinggi untuk peluang adalah 0,20, mulai tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat serta adanya kepedulian wakil-wakil rakyat di DPRD dalam dunia pendidikan dasar. Skor peluang terendah adalah 0,15 untuk peningkatan dana dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan pendidikan dasar di daerah. Untuk ancaman, peneliti memberikan bobot tertinggi adalah 0,03 kondisi Sosial budaya masyarakat dan tidak berfungsinya dengan baik komite sekolah dan dewan pendidikan. Sedangkan untuk skor terendah adalah 0,02 untuk kurangnya koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar pelaku dan pengambil kebijakan pendidikan dan respon orangtua yang belum maksimal terhadap pendidikan.

Berdasarkan tabel EFAS di atas, dapat diketahui peluang pembangunan

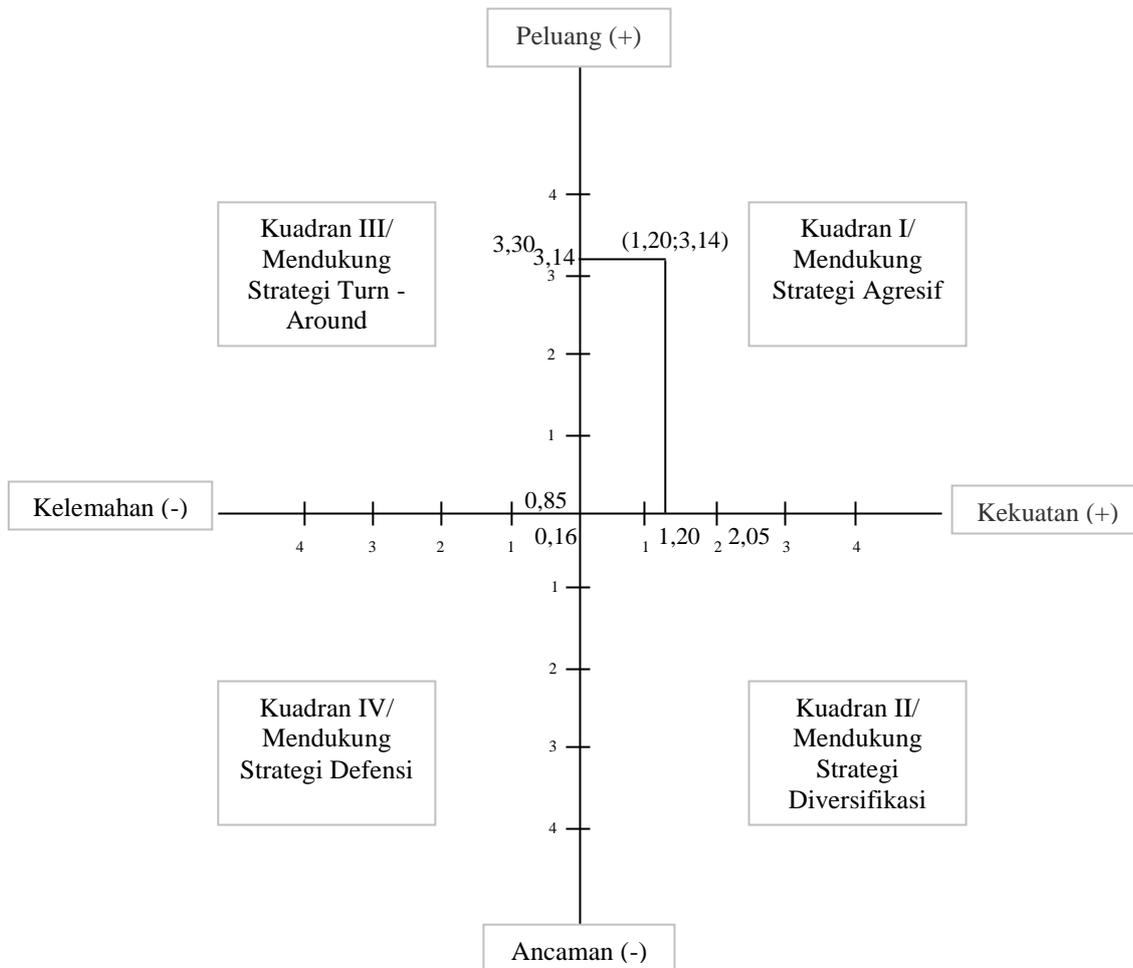
pendidikan dasar di Kabupaten Solok Selatan sangat dominan yaitu sebesar (+3,30) dengan ancaman yang cukup kecil sebesar (-0,16). Ini menggambarkan bahwa peluang yang harus dikejar dalam pembangunan pendidikan dasar untuk mencapai pendidikan yang berkualitas yaitu sebesar (+3,14).

Untuk tabel IFAS terlihat kekuatan pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Solok Selatan sebesar (+2,05) dengan kelemahan yang cukup kecil yaitu (-0,85). Ini berarti bahwa kekuatan pembangunan pendidikan dasar yang ada cukup dominan yaitu sebesar (+1,20) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di solok selatan.

Data yang didapatkan dari hasil analisis tabel diatas digambarkan dalam bentuk diagram pada gambar 1. Pada kuadran I, terlihat bahwa kekuatan yang diperoleh pembangunan pendidikan dasar Kabupaten Solok Selatan sebesar 2,05 dan nilai kelemahannya sebesar 0,85 pada kuadran IV, sehingga strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dasar dalam meminimalisasi berbagai fenomena pendidikan di Kabupaten Solok Selatan dengan memanfaatkan program-program pemerintah dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun, sehingga mampu mengurangi angka partisipasi yang cukup tinggi pada daerah-daerah terisolir. Untuk

mendukung pertumbuhan strategi agresif dapat dilakukan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana berupa pembangunan sekolah asrama atau yang lebih

dikenal dengan *boarding school* dan pembangunan SD-SMP Satu Atap, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi di daerah terisolir.



Gambar 1. Diagram Analisa SWOT Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok Selatan

Untuk pendidikan menengah, pemberian skor tabel IFAS menetapkan skor bobot kekuatan tertinggi 0,15. Skor tersebut dimaksudkan karena peneliti memandang bahwa pendidikan menengah di solok selatan memiliki alokasi anggaran yang sangat memadai dan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. Sedangkan skor bobot

kekuatan terendah adalah 0,10 untuk point kaya akan budaya dan muatan-muatan lokal dan implementasi sistim penganggaran berbasis kinerja juga menentukan dalam pembangunan pendidikan dasar di solok selatan.

Pemberian skor pada tabel EFAS, peneliti memberikan skor tertinggi untuk

peluang adalah 0,20, karena adanya kepedulian DPRD serta potensi daerah yang menjanjikan untuk pengembangan sekolah menengah kejuruan. Skor peluang terendah adalah 0,10. Untuk ancaman, peneliti memberikan bobot tertinggi adalah 0,05 untuk animo masyarakat bahwa pendidikan tidak

begitu penting dan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan untuk skor terendah adalah 0,02 untuk kurangnya koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar pelaku dan pengambil kebijakan pendidikan dan respon orang tua yang belum maksimal terhadap pendidikan.

Tabel 2. IFAS dan EFAS Pendidikan Menengah

| No. | Faktor-faktor Strategis | Bobot (B) | Rating (R) | B x R | Kode |
|------------|---|-------------|------------|-------------|------|
| I. | Internal | | | | |
| A. | Kekuatan (Strengths) | | | | |
| 1. | Kemampuan pembiayaan / alokasi anggaran pendidikan yang sangat memadai. | 0,15 | 4 | 0,80 | S1 |
| 2. | Kaya akan budaya dan muatan-muatan lokal. | 0,10 | 3 | 0,30 | S2 |
| 3. | Implementasi sistim penganggaran berbasis kinerja. | 0,10 | 3 | 0,30 | S3 |
| 4. | Dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah. | 0,15 | 4 | 0,60 | S4 |
| | Jumlah | 0,50 | | 2,00 | |
| B. | Kelemahan (Weakness) | | | | |
| 1. | Fasilitas di sekolah kejuruan sangat minim. | 0,10 | 2 | 0,20 | W1 |
| 2. | Rendahnya daya saing siswa. | 0,15 | 1 | 0,15 | W2 |
| 3. | Kurangnya pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan. | 0,10 | 2 | 0,20 | W3 |
| 4. | Rendahnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik. | 0,15 | 1 | 0,15 | W4 |
| | Jumlah | 0,50 | | 0,70 | |
| | Total IFAS | 1,00 | | 2,70 | |
| II. | Eksternal | | | | |
| A. | Peluang (Opportunities) | | | | |
| 1. | Adanya kepedulian DPRD pada dunia pendidikan. | 0,20 | 3 | 0,60 | O1 |
| 2. | Kebijakan pendidikan berbasis ICT melalui jardiknas | 0,15 | 3 | 0,45 | O2 |
| 3. | Adanya potensi daerah yang menjanjikan | 0,20 | 4 | 0,80 | O3 |
| 4. | Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan di daerah | 0,15 | 3 | 0,45 | O4 |
| | Jumlah | 0,70 | | 2,30 | |
| B. | Ancaman (Threats) | | | | |
| 1. | Animo masyarakat bahwa pendidikan tidak begitu penting. | 0,05 | 2 | 0,10 | T1 |
| 2. | Kurangnya koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar pelaku dan pengambil kebijakan pendidikan | 0,02 | 1 | 0,02 | T2 |
| 3. | Respon orang tua yang belum maksimal terhadap pendidikan | 0,02 | 1 | 0,02 | T3 |
| 4. | Perkembangan teknologi /informasi | 0,05 | 2 | 0,10 | T4 |
| | Jumlah | 0,14 | | 0,24 | |
| | Total EFAS | 0,84 | | 2,54 | |

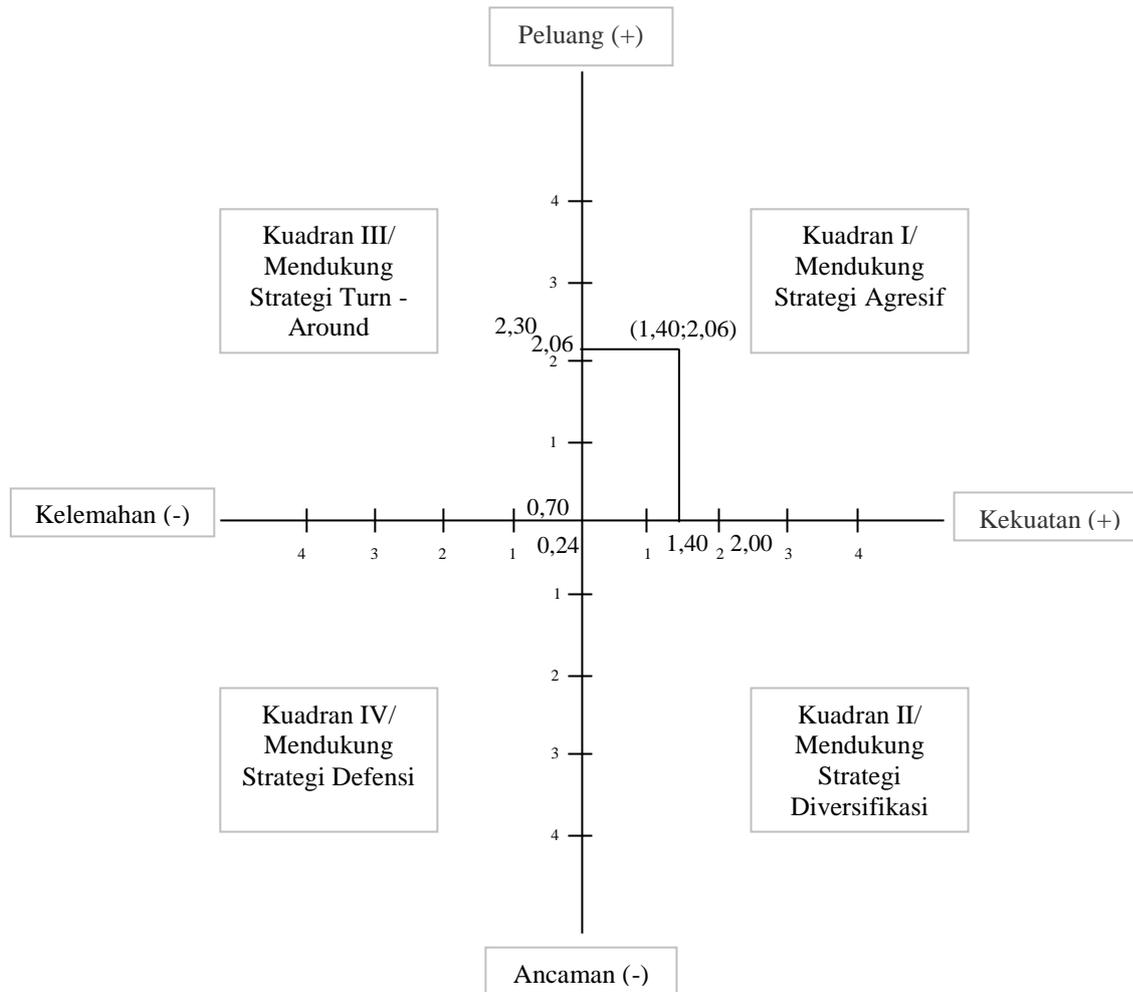
Sumber: Hasil Perhitungan Peneliti

Berdasarkan tabel EFAS di atas, dapat diketahui peluang pembangunan pendidikan menengah di Kabupaten Solok Selatan sangat

dominan yaitu sebesar (+2,30) dengan ancaman yang cukup kecil sebesar (-0,24). Ini menggambarkan bahwa peluang yang harus dikejar dalam pembangunan pendidikan

menengah untuk mencapai pendidikan yang berkualitas yaitu sebesar (+2,06). Untuk tabel IFAS terlihat kekuatan pembangunan pendidikan menengah di Kabupaten Solok Selatan sebesar (+2,00) dengan kelemahan

yang cukup kecil yaitu (-0,70). Ini berarti bahwa kekuatan pembangunan pendidikan menengah yang ada cukup dominan yaitu sebesar (+1,40) untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah.



Gambar 2. Diagram Analisa SWOT Pendidikan Menengah di Kabupaten Solok Selatan

Pada kuadran I, terlihat bahwa kekuatan yang diperoleh pembangunan pendidikan dasar Kabupaten Solok Selatan sebesar 2,00 dan nilai kelemahannya sebesar 0,70 pada kuadran IV, sehingga strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Untuk mendukung

strategi pertumbuhan agresif dengan menggunakan kekuatan berupa kemampuan keuangan bidang pendidikan menengah dengan memanfaatkan peluang-peluang dari segi potensi daerah dalam rangka pengembangan sekolah menengah kejuruan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.

Analisa Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Solok Selatan
Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Dasar

Dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2006 – 2010 program pendidikan dasar bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTs, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Berdasarkan tujuan yang ditekankan dalam RPJM, telah disusun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dititikberatkan pada: (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjarangan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SLTP/MTS/Paket B atau bentuk lainnya yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan

meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Terkait dengan RPJMD tertuang rencana tahunan RKPd untuk mewujudkan rencana pembangunan terutama pendidikan. RPKD memuat sasaran dan arah, kebijakan dan program pembangunan pendidikan berupa matrik prioritas.

Dokumen perencanaan yang disusun oleh SKPD Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan pendidikan dasar adalah Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2006 – 2010 dan rencana kerja tahunan (RENJA). Untuk pelaksanaan proses perencanaan relevan dengan adanya proses penganggaran. Penganggaran yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pendidikan dalam penyusunan APBD harus mampu memenuhi prinsip penganggaran berbasis kinerja yaitu efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan alokasi anggaran, sehingga program-program pendidikan dasar yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan pada saat penetapan APBD.

Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharuskan

membuat perencanaan dan penganggaran untuk pendidikan menengah sama halnya dengan pendidikan dasar. Dokumen perencanaan melahirkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau oleh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalur formal ataupun nonformal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C, yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan Sekolah Menengah Pertama secara signifikan, sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pendidikan kejuruan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal didorong untuk mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi tetapi masuk ke dunia kerja.

Matrik Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan matrik konsistensi diformulasikan dari dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Dari matrik tersusun yakni: (1) Penyusunan program-kegiatan dari dokumen perencanaan RPJM tahun 2011-2015, RENSTRA-dinas pendidikan tahun 2011-2015, RKPD tahun 2012 dan Renja dinas pendidikan tahun 2012 bidang pembangunan pendidikan dasar dan

menengah, (2) Penyusunan program dan kegiatan dari dokumen penganggaran KUA tahun 2012 dan APBD tahun anggaran 2012 bidang pembangunan pendidikan dasar dan menengah.

Analisa Matrik Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

RPJPD sebagai satu dokumen yang berskala waktu 20 tahun, memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan estimasi kondisi 20 tahun kedepan yang diharapkan. Sebagai upaya untuk mempertegas dan merinci perencanaan 20 tahun tersebut dapat dilihat pada matrik konsistensi dokumen RPJPD tahun 2006-2026 dengan RPJMD tahun 2011-2015 terkait bidang pendidikan dasar dan menengah yang terdapat pada tabel 3.

Pada matrik tersebut terdapat upaya untuk memperinci target sasaran masa depan kedalam jangka waktu 5 (lima) tahunan secara terukur. Dokumen perencanaan RPJPD merumuskan beberapa aspek dalam pembangunan pendidikan, meskipun belum terklasifikasi pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan pada dokumen perencanaan RPJMD telah tertuang dalam bentuk program dan terklasifikasi pada tingkatan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, namun belum mampu secara cermat merinci program-program untuk meminimalisasi permasalahan dalam pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 3. Matrik Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJPD Tahun 2006-2026 dengan RPJMD Tahun 2011-2015 Perencanaan

| RPJPD | RPJMD | |
|--|--|--|
| | Pendidikan Dasar (9 Tahun) | Pendidikan Menengah |
| a. Peningkatan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan, mulai dari pra sekolah sampai sekolah lanjutan atas. | a. Peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjangkauan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD/MI termasuk Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD/MI termasuk Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat. | a. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non formal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C |
| b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sebagai basis dalam proses peningkatan mutu dan relevansi pendidikan | b. Mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan. | |
| c. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru sehingga tenaga kependidikan sudah sesuai dengan tuntutan UU tentang guru dan dosen. | c. Penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. | |
| d. Peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya peningkatan kualitas implementasi manajemen berbasis sekolah (<i>school base management</i>) | | |
| e. Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi dan peran komite sekolah dan dewan pendidikan kabupaten sebagai mitra sistem persekolahan | | |

Sumber : Draft RPJPD dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan

Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai dokumen rencana pembangunan yang menggabungkan antara rencana pencapaian target 5 tahunan sebagai upaya konsistensi terhadap rencana pembangunan jangka panjang dengan rencana untuk mewujudkan visi kepala daerah, disamping berupaya mengakomodasi berbagai isu yang sedang dihadapi. Perwujudan dari keinginan di atas, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan yang akan

menjadi tanggung jawab SKPD-Dinas Pendidikan. Akan tetapi, dokumen RPJMD yang ada tidak memberi penjelasan mengenai SKPD mana bertanggung jawab untuk program-program tertentu. Kemudian SKPD dalam merumuskan visi dalam dokumen Renstranya belum tepat. Artinya belum tepat yakni apabila visi yang disusun tidak sepenuhnya berorientasi pada upaya pencapaian target program yang sudah diamanatkan dalam dokumen RPJMD.

Sebagai dokumen rencana multi year, Renstra SKPD dinas pendidikan sudah harus mempunyai target terukur yang terdistribusi dalam target tahunan, yakni Renja SKPD (Dinas Pendidikan). Sebagai dokumen rencana tahunan, semua program yang ada pada RKPD bidang pendidikan dasar dan menengah harus terintegrasi dalam Renja SKPD (Dinas Pendidikan). Integrasi antara dokumen KUA dengan APBD dari matrik yang telah disusun menunjukkan konsistensi antar program dan kegiatan.

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian tentang analisis perencanaan dan penganggaran pendidikan di Kabupaten Solok Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dalam penyusunan faktor-faktor strategis kondisi eksternal dan internal pendidikan dasar, diperoleh EFAS dengan peluang sebesar (+3,14) dan IFAS dengan kekuatan sebesar (+1,20) untuk pencapaian pembangunan pendidikan dasar. Dari angka tersebut, dibuatkan diagram analisa SWOT yang menunjukkan hasil / perpotongan pada kuadran I yakni mendukung strategi pertumbuhan agresif. Strategi pertumbuhan agresif dilakukan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan khususnya pada daerah yang kesulitan akses / terisolir, (2) Dalam penyusunan faktor-faktor strategis kondisi eksternal dan internal pendidikan menengah, diperoleh EFAS dengan peluang

sebesar (+2,06) dan IFAS dengan kekuatan sebesar (+1,40) untuk pencapaian pembangunan pendidikan dasar. Dari angka tersebut, dibuatkan diagram analisa SWOT yang menunjukkan hasil / perpotongan pada kuadran I yakni mendukung strategi pertumbuhan agresif. Strategi pertumbuhan agresif yakni melalui pengembangan sekolah menengah kejuruan, (3) Bahwa evaluasi dokumen perencanaan (RPJPD bidang pendidikan, RPJMD bidang pendidikan, RKPD, Renstra-Dinas Pendidikan dan Renja-Dinas Pendidikan) dan dokumen penganggaran (KUA dan APBD) bidang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan belum mengikuti aturan penyusunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai contoh dokumen perencanaan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan tidak terdapat kebijakan, strategi dan program untuk jangka waktu lima tahunan (2006-2010), (4) Perumusan program, kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah masih didasarkan pada kepentingan beberapa kelompok sehingga berdampak tidak relevan terhadap kebutuhan pendidikan saat itu dan belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan, (5) Analisis dokumen perencanaan belum menunjukkan konsistensi yang cukup baik, terutama untuk dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD. Program-

program bidang pendidikan dasar dan menengah yang terdapat pada dokumen tersebut belum sinkron dikarenakan penyusunan dokumen RPJMD yang merupakan visi dan misi kepala daerah lebih dahulu disusun dari RPJPD.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan agar: (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pendidikan dasar dan menengah yang baik harus dirumuskan dengan seksama agar permasalahan pendidikan dasar dan menengah dapat diminimalisir, (2) Dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan, dilakukan pengkajian terhadap kondisi eksisting secara mendalam dan dilakukan analisis menggunakan metoda yang mampu menghasilkan program dan kegiatan yang mampu meminimalkan permasalahan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. 2011. *Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015*. Solok Selatan: Bappeda Kabupaten Solok Selatan.
- Bappenas. 2004. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Wajah Pendidikan Bangsa : Hasil Survei Pendidikan Nasional 2003 Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Balitbang, Depdiknas.
- Depkeu. 2007. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Pelengkap Buku Pegangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Dinas Pendidikan. 2010. *Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2006-2010*. Solok Selatan: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- Dinas Pendidikan. 2012. *Profil Pendidikan Propinsi Sumatera Barat*. Padang: Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, F. 2003. *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.